EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DATA TERINTEGRASI MELALUI SATU DATA PINRANG DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN PINRANG

Filzah Dian Azizah
NPP. 33.0991
Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan
Email: filzahdnzh@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Helianus Rudianti, M.Si
Email: helianus_rudianto72@yahoo.com

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *Digital government requires integrated, accurate, up-to-date, and accountable data. However, regional sectoral data management is still constrained by differences in standards, weak interagency coordination, uneven human resource capacity, and low public use of data portals. These conditions are also found in the implementation of Satu Data Pinrang, which already has a digital data portal but has not yet achieved optimal integration and utilization.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the effectiveness of integrated data management through the Satu Data Pinrang Portal at the Department of Communication, Informatics, and Encryption of Pinrang Regency.* ***Method:*** *This study used a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation. Informants were selected purposively from Diskominfotik, Bappeda, regional agencies as data producers, portal operators, and community data users. Data were analyzed using Kreitner and Kinicki's organizational effectiveness theory, which includes goal achievement, efficiency, adaptability, output quality, and stakeholder satisfaction.* ***Result:*** *The findings show that Satu Data Pinrang has supported data centralization, planning documents, transparency, and access to public information. However, its effectiveness remains suboptimal because data updating is inconsistent, metadata standards are not uniformly applied, stakeholder coordination is still weak, operators' technical capacity is limited, and public data literacy remains low.* ***Conclusion:*** *This study concludes that Satu Data Pinrang has contributed to data-based governance, but its effectiveness needs to be strengthened through metadata standardization, regular data updating, technical training, stronger coordination, improved infrastructure, and wider public socialization.*

Keywords: Data Governance; Digital Government; Effectiveness; Integrated Data; Satu Data Pinrang

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penulis berfokus pada permasalahan pengelolaan data terintegrasi melalui Satu Data Pinrang yang telah didukung portal digital, tetapi belum berjalan optimal karena masih terdapat perbedaan format data, ketidakseragaman metadata, keterlambatan pembaruan dataset, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi yang belum kuat antara Produsen Data, Walidata, dan Pembina Data. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan data terintegrasi melalui Satu Data Pinrang pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Pinrang. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui

wawancara semi-terstruktur, observasi non-partisipatif, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive dari Diskominfotik, Bappeda, OPD produsen data, operator portal, dan masyarakat pengguna data. Analisis menggunakan teori efektivitas organisasi Kreitner dan Kinicki yang meliputi pencapaian tujuan, efisiensi, adaptabilitas, kualitas hasil, dan kepuasan pemangku kepentingan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan data terintegrasi melalui Satu Data Pinrang belum sepenuhnya optimal. Dimensi pencapaian tujuan mulai tercapai melalui keterlibatan 46 OPD dan ketersediaan 620 dataset, tetapi integrasi data lintas sektor belum menyeluruh. Dimensi efisiensi masih terkendala keterlambatan pembaruan data dan kemampuan teknis operator OPD yang belum merata. Dimensi adaptabilitas tergolong cukup karena telah menggunakan portal digital, namun penguatan SDM dan teknologi masih diperlukan. Dimensi kualitas hasil masih menghadapi persoalan perbedaan format data dan metadata, sedangkan kepuasan pemangku kepentingan cukup baik di lingkungan pemerintah, tetapi pemanfaatan oleh masyarakat masih rendah karena kurangnya sosialisasi dan literasi data. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa Satu Data Pinrang memiliki potensi strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis data, tetapi efektivitasnya perlu diperkuat melalui standardisasi data dan metadata, forum koordinasi data, pelatihan teknis berkelanjutan, regulasi teknis daerah yang lebih jelas, penguatan infrastruktur digital, serta sosialisasi portal kepada masyarakat.
Kata kunci: Data Terintegrasi; Efektivitas; Pemerintahan Digital; Satu Data Pinrang; Tata Kelola Data

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara pemerintah mengelola informasi, menyusun kebijakan, dan memberikan pelayanan publik. Dalam tata kelola pemerintahan modern, data tidak lagi dipahami sebagai kumpulan angka administratif, melainkan sebagai aset strategis yang menentukan kualitas pengambilan keputusan. OECD (2019) menegaskan bahwa sektor publik berbasis data membutuhkan tata kelola yang mendorong integrasi, pemanfaatan kembali, dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Sejalan dengan itu, DAMA International (2020) menempatkan tata kelola data, metadata, kualitas data, dan integrasi data sebagai unsur utama manajemen data organisasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah membutuhkan sistem pengelolaan data yang mampu memastikan data tersedia secara akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.

Kebijakan Satu Data Indonesia yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 menjadi salah satu jawaban pemerintah terhadap persoalan fragmentasi data antarinstansi. Kebijakan ini menekankan bahwa data pemerintah harus akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan antarinstansi. Dalam konteks Kabupaten Pinrang, penguatan tersebut juga didukung melalui Peraturan Bupati Pinrang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Pinrang. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan data daerah tidak dapat dilakukan secara sektoral, tetapi membutuhkan standardisasi, metadata, interoperabilitas, koordinasi kelembagaan, serta komitmen pembaruan data dari setiap organisasi perangkat daerah.

Di tingkat daerah, pelaksanaan Satu Data semakin penting karena pemerintah daerah merupakan produsen utama data sektoral yang berkaitan langsung dengan pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, infrastruktur, dan pelayanan publik. Suradinata (1998) menempatkan

manajemen pemerintahan daerah sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan otonomi, sehingga pengelolaan informasi dan sumber daya pemerintahan harus diarahkan untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan urusan daerah. Hasnita dan Salomo (2025) juga menegaskan bahwa pembelajaran kebijakan Satu Data Indonesia diperlukan agar kebijakan publik semakin didukung oleh data yang dapat dipercaya. Dalam era digital, tuntutan tersebut semakin nyata karena organisasi perangkat daerah tidak hanya diminta menghasilkan data, tetapi juga memastikan data tersebut dapat diintegrasikan, dibaca lintas sektor, dan digunakan bersama dalam perencanaan pembangunan.

Kabupaten Pinrang telah mengembangkan Portal Satu Data Pinrang sebagai instrumen integrasi data pembangunan daerah. Berdasarkan hasil penelitian, portal tersebut telah mencakup 46 Organisasi Perangkat Daerah dengan 620 dataset yang tersedia. Capaian ini menunjukkan adanya komitmen awal pemerintah daerah dalam menyediakan ruang pengelolaan dan publikasi data yang lebih terbuka. Namun, keberadaan portal belum otomatis menunjukkan efektivitas pengelolaan data. Hasil observasi awal menunjukkan masih terdapat OPD yang belum memperbarui data secara teratur, perbedaan format data antarinstansi, metadata yang belum seragam, serta belum kuatnya mekanisme koordinasi antara Walidata, Pembina Data, dan Produsen Data. Kondisi tersebut menunjukkan adanya jarak antara tujuan ideal kebijakan Satu Data dengan praktik pengelolaan data di lapangan.

Persoalan tersebut berkaitan erat dengan kualitas pelayanan publik dan kapasitas birokrasi digital. Nurdin (2019) menekankan bahwa kualitas pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh prosedur, tetapi juga oleh perilaku aparatur dan komunikasi birokrasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Satu Data Pinrang, kualitas pelayanan informasi publik sangat bergantung pada kemampuan aparatur dalam memproduksi, memverifikasi, memperbarui, dan mengomunikasikan data secara konsisten. Karya Mohammad Rezza Fahlevi bersama Tampubolon et al. (2025) mengenai user experience aplikasi e-purchasing menunjukkan bahwa keberhasilan aplikasi pemerintahan digital dipengaruhi oleh kemudahan penggunaan, transparansi proses, dan kesiapan pengguna. Oleh karena itu, efektivitas Satu Data Pinrang perlu dilihat sebagai bagian dari transformasi birokrasi, bukan hanya sebagai persoalan teknis pengunggahan data.

Selain itu, konsep open government data menjadi relevan karena portal data pemerintah seharusnya tidak hanya digunakan oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat, akademisi, media, dan pelaku pembangunan lainnya. Wirtz et al. (2022) menunjukkan bahwa open government data memiliki potensi besar bagi transparansi, partisipasi, kolaborasi, dan pengembangan ekonomi digital. Namun, potensi tersebut hanya dapat dicapai apabila data tersedia dalam kualitas yang baik, mudah diakses, dapat digunakan ulang, serta didukung kapasitas pengguna. Dalam kasus Satu Data Pinrang, pemanfaatan data oleh masyarakat masih rendah karena sosialisasi terbatas dan literasi data belum merata. Hal ini menjadi tantangan penting bagi pemerintah daerah agar portal tidak hanya menjadi tempat penyimpanan dataset, tetapi juga menjadi sarana penguatan tata kelola pemerintahan berbasis data.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penelitian ini berangkat dari kesenjangan antara kondisi ideal tata kelola data sebagaimana diatur dalam kebijakan Satu Data Indonesia dan kondisi aktual pengelolaan data pada Portal Satu Data Pinrang. Secara normatif, pemerintah daerah wajib menyediakan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat dibagipakaikan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengelolaan data masih menghadapi persoalan teknis, kelembagaan, dan sumber daya manusia. Beberapa OPD masih menggunakan format internal

yang berbeda, proses pembaruan data belum sepenuhnya terjadwal, kapasitas operator tidak merata, serta data yang tersedia belum seluruhnya memenuhi kebutuhan integrasi lintas sektor.

Kesenjangan lain terlihat dari kajian akademik terdahulu. Studi mengenai Satu Data Indonesia pada umumnya membahas implementasi kebijakan, koordinasi, keterbukaan informasi, atau kesiapan sistem secara umum. Rachmat et al. (2024) menyoroti tata kelola Satu Data Indonesia pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi, sedangkan Hidayat (2024) mengaitkan sistem informasi terintegrasi dengan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan lokal. Fitrianti et al. (2023) juga menunjukkan bahwa efektivitas sistem informasi pemerintah daerah berhubungan dengan penyusunan dokumen perencanaan. Akan tetapi, penelitian yang secara khusus menilai efektivitas pengelolaan data terintegrasi melalui Satu Data Pinrang dengan menggunakan dimensi efektivitas organisasi masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menempatkan Satu Data Pinrang sebagai objek evaluasi efektivitas berdasarkan pencapaian tujuan, efisiensi, adaptabilitas, kualitas hasil, dan kepuasan pemangku kepentingan.

1.3. Urgensi Penelitian

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan pemerintah daerah untuk memperkuat pengambilan keputusan berbasis data. Jika pengelolaan data tidak efektif, maka proses perencanaan pembangunan dapat berjalan berdasarkan data yang tidak seragam, tidak mutakhir, atau tidak dapat dibandingkan antarinstansi. Dampaknya, prioritas pembangunan berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan faktual masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Pinrang, portal yang telah tersedia perlu dievaluasi agar tidak berhenti sebagai simbol digitalisasi, tetapi benar-benar menjadi instrumen tata kelola data yang mendukung perencanaan, penganggaran, evaluasi, dan pelayanan publik.

Urgensi penelitian ini juga berkaitan dengan perubahan karakter birokrasi menuju pemerintahan digital. Akbar et al. (2022) menunjukkan bahwa interoperabilitas merupakan tema penting dalam riset e-government karena pertukaran informasi yang lancar antarinstansi menjadi prasyarat layanan publik digital. Campmas et al. (2022) bahkan menegaskan bahwa interoperabilitas harus menjadi unsur utama dalam perancangan layanan publik digital karena keterbatasan aliran data dapat menambah beban administrasi dan menghambat pemanfaatan layanan. Dengan demikian, penelitian mengenai Satu Data Pinrang penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana integrasi data daerah telah berjalan dan aspek apa saja yang perlu diperbaiki.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian internasional yang relevan dengan tata kelola data, interoperabilitas, e-government, dan open government data. Yukhno (2024) meneliti big data governance dalam administrasi publik dan menegaskan bahwa transformasi digital menuntut pembentukan ekosistem digital yang berpusat pada data. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada perhatian terhadap data sebagai aset strategis pemerintahan, sedangkan perbedaannya adalah penelitian Yukhno berada pada tataran konseptual administrasi publik secara luas, sementara penelitian ini berfokus pada efektivitas pengelolaan data terintegrasi di tingkat kabupaten.

Akbar et al. (2022) melakukan pemetaan tren riset interoperabilitas e-government berbasis database Scopus. Penelitian tersebut menemukan tema dominan seperti interoperability, e-government, systems, technology, data, dan services. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada penekanan bahwa interoperabilitas menjadi kunci kelancaran pertukaran informasi

antarinstansi pemerintah. Perbedaannya adalah penelitian Akbar et al. menggunakan pendekatan systematic review dengan perangkat VOSviewer dan NVivo, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif pada pengelolaan Portal Satu Data Pinrang.

Campmas et al. (2022) meneliti peran national interoperability frameworks dan kualitas layanan e-government terhadap interaksi daring warga dengan administrasi publik di Eropa. Hasilnya menunjukkan bahwa kerangka interoperabilitas dan layanan e-government yang lebih baik mendorong penggunaan layanan publik digital. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama menempatkan interoperabilitas sebagai unsur penting layanan digital pemerintah. Perbedaannya, Campmas et al. menggunakan analisis panel pada negara-negara Eropa, sedangkan penelitian ini menganalisis satu kasus pemerintah daerah di Indonesia.

Mao dan Zhu (2025) meneliti kontribusi integrasi e-government terhadap kualitas dan kesetaraan pelayanan publik di China. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi e-government mampu meningkatkan kualitas layanan melalui efisiensi administrasi dan inovasi teknologi. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama melihat integrasi digital pemerintah sebagai instrumen peningkatan kualitas layanan publik. Perbedaannya, Mao dan Zhu menggunakan data panel provinsi, sedangkan penelitian ini menggunakan data kualitatif dari informan dan dokumen pengelolaan Satu Data Pinrang.

Wirtz et al. (2022) melakukan systematic literature review terhadap 169 studi empiris mengenai open government data. Penelitian tersebut menegaskan bahwa open government data memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi, partisipasi, kolaborasi, dan nilai ekonomi, tetapi membutuhkan pemahaman yang utuh mengenai faktor pendahulu, keputusan implementasi, dan hasil. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada perhatian terhadap keterbukaan data pemerintah, sedangkan perbedaannya adalah penelitian Wirtz et al. berupa kajian literatur global, sementara penelitian ini mengevaluasi efektivitas pengelolaan data pada portal pemerintah daerah.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara khusus menganalisis efektivitas pengelolaan data terintegrasi melalui Satu Data Pinrang pada tingkat pemerintah kabupaten. Berbeda dari penelitian terdahulu yang banyak menekankan implementasi kebijakan secara umum, penelitian ini menggunakan teori efektivitas organisasi Kreitner dan Kinicki (2016) untuk menilai lima dimensi utama, yaitu pencapaian tujuan, efisiensi, adaptabilitas, kualitas hasil, dan kepuasan pemangku kepentingan. Robbins dan Judge (2019) menegaskan bahwa efektivitas organisasi perlu dilihat dari kemampuan organisasi mencapai tujuan, mengelola sumber daya, serta merespons kebutuhan lingkungannya. Dengan kerangka ini, penelitian tidak hanya mengukur keberadaan portal atau jumlah dataset, tetapi juga menilai sejauh mana portal tersebut mampu mendukung tujuan kebijakan, mempercepat proses kerja, menyesuaikan diri terhadap kebutuhan digital, menghasilkan data berkualitas, dan memenuhi kebutuhan pengguna.

Kebaruan lain terletak pada lokus penelitian, yaitu Kabupaten Pinrang yang telah mengembangkan portal Satu Data namun masih menghadapi persoalan integrasi dan pembaruan data. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris bagi kajian pemerintahan digital di daerah karena menghadirkan pemetaan masalah secara kontekstual serta rekomendasi penguatan tata kelola data yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam memperbaiki mekanisme standardisasi, koordinasi, kapasitas SDM, regulasi teknis, dan literasi data publik.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan data terintegrasi melalui Satu Data Pinrang pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Pinrang berdasarkan dimensi pencapaian tujuan, efisiensi, adaptabilitas, kualitas hasil, dan kepuasan pemangku kepentingan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya memahami secara mendalam proses, dinamika, hambatan, dan makna pengelolaan data terintegrasi melalui Portal Satu Data Pinrang. Fadli (2021) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial secara holistik dan kontekstual, sedangkan Sugiyono (2013) menegaskan bahwa pendekatan kualitatif sesuai digunakan ketika peneliti menjadi instrumen utama dalam memahami situasi sosial secara alamiah. Nurdin dan Hartati (2019) juga menjelaskan bahwa penelitian sosial membutuhkan pemahaman kontekstual terhadap fenomena yang diteliti, sehingga pendekatan kualitatif sesuai untuk mengkaji praktik tata kelola data dalam organisasi pemerintahan.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan Portal Satu Data Kabupaten Pinrang. Data sekunder diperoleh melalui dokumen regulasi, dokumen kebijakan, data portal, laporan terkait Satu Data, serta literatur akademik yang relevan. Penggabungan kedua jenis data tersebut dilakukan agar temuan penelitian tidak hanya menggambarkan persepsi informan, tetapi juga dapat diverifikasi dengan dokumen resmi dan kondisi faktual pada sistem.

Informan penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling. Informan terdiri dari Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Kepala Bidang Informasi dan Statistik, Kepala Subbidang Informasi dan Statistik, administrator atau operator Portal Satu Data Pinrang, Bappeda sebagai Pembina Data, perwakilan OPD sebagai Produsen Data, serta masyarakat pengguna data. Pemilihan informan tersebut didasarkan pada keterlibatan langsung masing-masing pihak dalam pengelolaan, verifikasi, pembaruan, publikasi, dan pemanfaatan data. Dengan komposisi informan tersebut, penelitian memperoleh gambaran dari sisi pembuat kebijakan, pengelola teknis, produsen data, dan pengguna data.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi non-partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur digunakan agar peneliti memiliki pedoman pertanyaan yang sesuai dengan dimensi efektivitas, tetapi tetap dapat menggali informasi tambahan sesuai jawaban informan. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi penggunaan portal, proses pengelolaan data, dan praktik pemanfaatan data. Dokumentasi dilakukan dengan menelaah regulasi, dokumen portal, daftar dataset, dan dokumen pendukung lain yang berhubungan dengan Satu Data Pinrang.

Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan tersebut merujuk pada Miles et al. (2014) yang menempatkan kondensasi atau reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai proses analisis kualitatif yang berlangsung secara interaktif. Data yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan lima dimensi efektivitas organisasi Kreitner dan Kinicki (2016), yaitu pencapaian tujuan, efisiensi, adaptabilitas, kualitas hasil, dan kepuasan pemangku kepentingan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Pinrang, khususnya pada

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik selaku Walidata daerah, dengan memperhatikan keterlibatan Bappeda, OPD produsen data, dan masyarakat pengguna data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis efektivitas pengelolaan data terintegrasi melalui Satu Data Pinrang dengan menggunakan teori efektivitas organisasi Kreitner dan Kinicki (2016). Efektivitas dinilai melalui lima dimensi, yaitu pencapaian tujuan, efisiensi, adaptabilitas, kualitas hasil, dan kepuasan pemangku kepentingan. Kerangka ini diperkuat oleh Robbins dan Judge (2019) yang memandang organisasi efektif sebagai organisasi yang mampu mencapai tujuan, menggunakan sumber daya secara tepat, dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan. Pembahasan berikut disusun sesuai dengan variabel utama penelitian, yaitu efektivitas pengelolaan data terintegrasi.

3.1. Efektivitas Pengelolaan Data Terintegrasi melalui Satu Data Pinrang

3.1.1. Pencapaian Tujuan

Dimensi pencapaian tujuan menunjukkan sejauh mana Portal Satu Data Pinrang mampu mewujudkan tujuan kebijakan Satu Data, yaitu menyediakan data sektoral yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan tersebut telah mulai tercapai. Hal ini tampak dari keterlibatan 46 OPD dalam pengelolaan data dan tersedianya 620 dataset pada portal. Ketersediaan data tersebut menunjukkan bahwa Satu Data Pinrang telah berjalan secara kelembagaan dan tidak lagi sekadar rancangan kebijakan.

Data yang tersedia dalam portal juga telah dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJMD, RKPD, RKA, dan DPA. Salah satu informan menjelaskan bahwa data dalam portal sering digunakan sebagai referensi dalam penyusunan dokumen perencanaan sehingga proses analisis kebutuhan pembangunan dapat dilakukan berdasarkan data yang lebih valid. Temuan ini menunjukkan bahwa Satu Data Pinrang memiliki kontribusi nyata dalam mendukung kebijakan berbasis bukti.

Namun, pencapaian tujuan tersebut belum sepenuhnya optimal karena integrasi data lintas sektor masih belum menyeluruh. Beberapa OPD masih mengelola data secara sektoral dan belum sepenuhnya menyesuaikan format data dengan standar yang dibutuhkan oleh Walidata. Dalam perspektif interoperabilitas, kondisi ini menjadi persoalan penting karena keberhasilan e-government sangat bergantung pada kemampuan sistem untuk saling terhubung dan bertukar data. Campmas et al. (2022) menegaskan bahwa keterbatasan interoperabilitas dapat menghambat aliran data, meningkatkan beban administrasi, dan menurunkan efektivitas layanan publik digital. Oleh karena itu, pencapaian tujuan Satu Data Pinrang perlu diperkuat melalui standardisasi dan integrasi yang lebih konsisten.

3.1.2. Efisiensi

Dimensi efisiensi berkaitan dengan kemampuan organisasi memanfaatkan sumber daya, waktu, anggaran, dan tenaga kerja secara tepat untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan. Dalam pengelolaan data, efisiensi terlihat dari kemampuan portal dalam menyederhanakan proses pengumpulan, pengolahan, verifikasi, dan publikasi data. DAMA International (2020) menjelaskan bahwa manajemen data yang baik harus mampu mengatur alur data secara jelas, mengurangi duplikasi, dan memastikan data dapat digunakan oleh organisasi. Dalam konteks Satu Data Pinrang, keberadaan portal telah membantu memusatkan proses penyediaan data sehingga perangkat daerah tidak lagi bekerja secara sepenuhnya terpisah.

Meskipun demikian, efisiensi belum berjalan optimal karena proses pembaruan dan pengunggahan data masih sering terlambat. Keterlambatan tersebut dipengaruhi oleh kemampuan teknis operator OPD yang belum merata, perbedaan format data, serta belum adanya jadwal pembaruan yang benar-benar dipatuhi oleh seluruh produsen data. Salah satu informan menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas admin OPD melalui pelatihan teknis sangat diperlukan agar mereka dapat mengelola data dengan lebih baik.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Buding dan Tiarani (2021) yang menekankan bahwa penerapan sistem digital internal pemerintahan membutuhkan SDM terlatih dan mekanisme kerja yang jelas agar teknologi benar-benar mendukung kinerja organisasi. Dengan demikian, efisiensi Satu Data Pinrang tidak cukup hanya ditopang oleh keberadaan portal, tetapi perlu diperkuat dengan SOP, pelatihan teknis, pembagian peran, dan monitoring yang terjadwal.

3.1.3. Adaptabilitas

Dimensi adaptabilitas menunjukkan kemampuan sistem dan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan kebutuhan data, perkembangan teknologi, dan dinamika kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satu Data Pinrang memiliki tingkat adaptabilitas yang cukup baik karena telah mengadopsi portal digital sebagai sarana pengelolaan dan publikasi data. Portal ini memungkinkan OPD mengunggah data sektoral dan memungkinkan pemangku kepentingan mengakses data pembangunan secara daring.

Adaptabilitas tersebut juga terlihat dari adanya mekanisme verifikasi dan validasi oleh Walidata sebelum data dipublikasikan. Mekanisme ini penting untuk memastikan bahwa data yang disajikan tidak hanya tersedia, tetapi juga layak digunakan. Dalam konteks pemerintahan digital, Mao dan Zhu (2025) menunjukkan bahwa integrasi e-government dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui efisiensi administrasi dan inovasi teknologi. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa adaptasi digital pada Satu Data Pinrang membuka peluang bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Namun, adaptabilitas masih perlu ditingkatkan karena kapasitas teknologi dan SDM belum sepenuhnya merata. Beberapa OPD masih membutuhkan pendampingan dalam pengisian metadata, pembaruan dataset, dan pemanfaatan data untuk analisis kebijakan. Selain itu, pengembangan fitur portal dan penguatan keamanan sistem juga menjadi kebutuhan penting agar portal mampu mengikuti perkembangan kebutuhan data daerah. Dengan demikian, adaptabilitas Satu Data Pinrang berada pada tahap berkembang, tetapi masih membutuhkan penguatan kelembagaan dan teknologi secara berkelanjutan.

3.1.4. Kualitas Hasil

Dimensi kualitas hasil berkaitan dengan ketepatan, akurasi, kemutakhiran, validitas, dan kesesuaian data dengan standar metadata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas data pada Satu Data Pinrang masih menjadi salah satu persoalan utama. Walaupun portal telah menyediakan banyak dataset, belum semua data memiliki format dan metadata yang seragam. Perbedaan standar antarOPD menyebabkan proses integrasi membutuhkan penyesuaian tambahan dan berpotensi menurunkan konsistensi data yang disajikan.

Salah satu informan menyampaikan bahwa masih terdapat perbedaan format dan kelengkapan data dari masing-masing OPD sehingga proses integrasi menjadi lebih lama. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas hasil tidak hanya ditentukan oleh jumlah dataset, tetapi juga oleh kesesuaian data dengan standar yang berlaku. Akbar et al. (2022) menempatkan data dan sistem sebagai tema dominan dalam interoperabilitas e-government. Artinya, kualitas data

merupakan dasar utama agar sistem pemerintahan digital dapat saling terhubung dan menghasilkan informasi yang dapat digunakan.

Dalam konteks open government data, Wirtz et al. (2022) menunjukkan bahwa nilai data terbuka sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menyediakan data yang dapat digunakan kembali dan dipercaya oleh pengguna. Prinsip ini sejalan dengan DAMA International (2020) yang menempatkan kualitas data dan metadata sebagai fondasi agar data dapat dikelola, ditelusuri, dan dimanfaatkan secara konsisten. Temuan Satu Data Pinrang memperlihatkan bahwa kualitas hasil masih memerlukan perbaikan, terutama melalui standardisasi metadata, penguatan validasi, dan penetapan jadwal pembaruan data yang mengikat seluruh OPD.

3.1.5. Kepuasan Pemangku Kepentingan

Dimensi kepuasan pemangku kepentingan menunjukkan sejauh mana pengguna internal dan eksternal merasakan manfaat dari Portal Satu Data Pinrang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan pemangku kepentingan di lingkungan pemerintah relatif cukup baik. OPD dan Bappeda memperoleh manfaat karena data yang tersedia dalam portal dapat membantu proses perencanaan dan penyusunan dokumen pembangunan. Portal juga memudahkan akses data secara terpusat sehingga mengurangi ketergantungan pada permintaan data manual antarinstansi.

Namun, tingkat pemanfaatan portal oleh masyarakat masih rendah. Beberapa masyarakat belum mengetahui keberadaan portal atau belum memahami cara menggunakan data yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepuasan pengguna eksternal belum maksimal. Nurdin (2019) menjelaskan bahwa pelayanan publik membutuhkan komunikasi birokrasi yang baik agar layanan dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah daerah perlu memperkuat sosialisasi, panduan penggunaan portal, dan literasi data publik agar masyarakat, akademisi, media, dan pelaku pembangunan dapat memanfaatkan Satu Data Pinrang secara lebih luas.

Rendahnya pemanfaatan publik juga menunjukkan bahwa keterbukaan data tidak hanya memerlukan akses teknis, tetapi juga strategi komunikasi. Jika masyarakat tidak mengetahui keberadaan portal atau tidak mampu membaca data, maka manfaat keterbukaan informasi tidak akan dirasakan secara optimal. Oleh karena itu, peningkatan kepuasan pemangku kepentingan perlu diarahkan pada dua sisi, yaitu peningkatan kualitas layanan bagi pemerintah sebagai pengguna internal dan peningkatan literasi data bagi masyarakat sebagai pengguna eksternal.

Tabel 1.
Ringkasan Temuan Efektivitas Pengelolaan Data Terintegrasi melalui Satu Data Pinrang

Dimensi Efektivitas	Temuan Utama	Implikasi terhadap Efektivitas
Pencapaian tujuan	Telah melibatkan 46 OPD dan menyediakan 620 dataset. Data digunakan dalam RPJMD dan RKPD, tetapi integrasi lintas sektor belum menyeluruh.	Tujuan kebijakan mulai tercapai, namun perlu penguatan integrasi data antarOPD.
Efisiensi	Portal memusatkan akses data, tetapi pembaruan data masih terlambat dan kemampuan operator OPD belum merata.	Efisiensi administratif meningkat, tetapi belum optimal tanpa SOP dan pelatihan teknis.

Adaptabilitas	Sistem telah berbasis portal digital dan memiliki proses verifikasi, tetapi pengembangan fitur, keamanan, dan kapasitas SDM masih dibutuhkan.	Adaptasi digital cukup baik, tetapi memerlukan pembaruan teknologi dan pendampingan berkelanjutan.
Kualitas hasil	Data belum sepenuhnya seragam dalam format dan metadata. Beberapa dataset belum mutakhir.	Kualitas data masih menjadi titik lemah utama dalam efektivitas pengelolaan.
Kepuasan pemangku kepentingan	Pemerintah cukup terbantu dalam perencanaan, tetapi pemanfaatan oleh masyarakat masih rendah.	Manfaat internal sudah terlihat, sedangkan manfaat publik perlu diperkuat melalui sosialisasi dan literasi data.

Sumber: Diolah peneliti (2026)

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas Satu Data Pinrang belum sepenuhnya optimal, walaupun telah memiliki modal penting berupa portal digital, keterlibatan OPD, dan ketersediaan dataset. Sama halnya dengan Hasnita dan Salomo (2025), penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Satu Data memerlukan proses pembelajaran kebijakan dan penguatan kelembagaan agar benar-benar mendukung kebijakan berbasis data. Temuan ini juga sejalan dengan Rachmat et al. (2024) yang menekankan pentingnya tata kelola Satu Data pada level pemerintah daerah, serta Hidayat (2024) yang menempatkan sistem informasi terintegrasi sebagai instrumen peningkatan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan lokal.

Temuan ini juga memperkuat penelitian Akbar et al. (2022) bahwa interoperabilitas merupakan isu kunci dalam pengembangan e-government. Hambatan yang ditemukan pada Satu Data Pinrang, seperti perbedaan format data dan metadata, menunjukkan bahwa sistem digital tidak akan efektif jika data antarinstansi tidak dapat dipertukarkan secara lancar. Dengan kata lain, teknologi portal hanya menjadi sarana, sedangkan keberhasilan integrasi sangat ditentukan oleh kesamaan standar, koordinasi kelembagaan, dan komitmen produsen data.

Berbeda dengan temuan Campmas et al. (2022) yang menunjukkan bahwa kerangka interoperabilitas nasional di Eropa mendorong peningkatan interaksi daring warga dengan administrasi publik, penelitian ini menemukan bahwa pemanfaatan publik terhadap portal Satu Data Pinrang masih rendah. Perbedaan ini disebabkan oleh konteks literasi data dan sosialisasi yang belum merata. Masyarakat belum sepenuhnya mengetahui keberadaan portal atau belum memahami manfaat data terbuka dalam aktivitas sehari-hari, penelitian, maupun pengawasan publik.

Temuan ini memperkuat Mao dan Zhu (2025) yang menunjukkan bahwa integrasi e-government dapat meningkatkan kualitas pelayanan melalui efisiensi administrasi dan inovasi teknologi. Pada Satu Data Pinrang, manfaat tersebut telah mulai terlihat dalam pemanfaatan data untuk dokumen perencanaan dan pengurangan ketergantungan pada data manual. Namun, kualitas dan kesetaraan manfaat belum sepenuhnya tercapai karena masih ada OPD yang kurang aktif memperbarui data dan masyarakat belum banyak menggunakan portal.

Temuan penelitian juga sejalan dengan Wirtz et al. (2022) bahwa open government data memiliki potensi besar, tetapi pemanfaatannya bergantung pada kualitas implementasi. Data

terbuka akan bernilai apabila tersedia dalam format yang jelas, dapat dipercaya, mudah digunakan, dan didukung oleh kebijakan serta kapasitas pengguna. Oleh karena itu, Satu Data Pinrang perlu diarahkan pada penguatan nilai guna data, bukan hanya peningkatan jumlah dataset.

3.3. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan beberapa hambatan utama yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan data terintegrasi melalui Satu Data Pinrang. Hambatan pertama adalah perbedaan standar dan format data antarOPD. Setiap OPD masih memiliki pola pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berbeda sehingga Walidata perlu melakukan penyesuaian sebelum data dapat diintegrasikan. Hambatan kedua adalah koordinasi yang belum optimal antara Walidata, Pembina Data, dan Produsen Data. Beberapa OPD masih mengelola data secara sektoral sehingga belum sepenuhnya mendukung kebutuhan integrasi lintas instansi.

Hambatan ketiga adalah keterbatasan kapasitas SDM dalam pengolahan dan analisis data. Tidak semua operator OPD memiliki kemampuan teknis yang sama dalam mengisi metadata, memperbarui dataset, dan memastikan validitas data. Hambatan keempat adalah belum kuatnya regulasi teknis daerah yang mengatur jadwal wajib pembaruan data dan sanksi bagi OPD yang tidak patuh. Ketiadaan mekanisme sanksi membuat akuntabilitas produsen data belum optimal. Hambatan kelima adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, termasuk kebutuhan peningkatan kapasitas server, keamanan sistem, dan stabilitas jaringan. Hambatan keenam adalah rendahnya literasi data aparatur dan masyarakat.

Berdasarkan temuan tersebut, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan. Pertama, Diskominfotik perlu memperkuat standardisasi data dan metadata melalui panduan teknis yang sama bagi seluruh OPD. Kedua, perlu dibentuk forum koordinasi data yang melibatkan Walidata, Pembina Data, dan Produsen Data untuk membahas pembaruan, verifikasi, dan kendala integrasi. Ketiga, pemerintah daerah perlu menyelenggarakan pelatihan teknis berkelanjutan bagi operator OPD. Keempat, perlu disusun regulasi teknis turunan yang memuat jadwal pembaruan data, mekanisme pelaporan, dan konsekuensi administratif. Kelima, infrastruktur teknologi dan keamanan sistem perlu diperkuat. Keenam, sosialisasi portal kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar data yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih luas.

Temuan menarik lainnya adalah bahwa efektivitas Satu Data Pinrang sangat dipengaruhi oleh hubungan antara aspek teknis dan aspek kelembagaan. Portal dapat dibuat secara digital, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada manusia, organisasi, aturan, dan budaya berbagi data. Buding dan Tiarani (2021) menunjukkan pentingnya sistem internal dan SDM terlatih dalam mendukung digitalisasi kinerja pemerintah. Fahlevi bersama Tampubolon et al. (2025) juga menunjukkan bahwa pengalaman pengguna menjadi unsur penting dalam keberhasilan aplikasi pemerintah digital. Dengan demikian, perbaikan Satu Data Pinrang perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui pembaruan aplikasi, tetapi juga melalui penguatan tata kelola, pelatihan, koordinasi, regulasi, dan komunikasi publik.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan data terintegrasi melalui Satu Data Pinrang pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya optimal, meskipun telah menunjukkan perkembangan positif. Pada dimensi pencapaian tujuan, portal telah melibatkan 46 OPD dan menyediakan 620 dataset serta digunakan dalam perencanaan pembangunan, tetapi integrasi lintas sektor masih belum menyeluruh. Pada dimensi efisiensi, portal telah memusatkan akses data, namun pembaruan dan

pengunggahan data masih terkendala kemampuan teknis operator dan ketidakteraturan jadwal. Pada dimensi adaptabilitas, sistem telah berbasis digital, tetapi masih membutuhkan penguatan SDM, fitur, keamanan, dan infrastruktur. Pada dimensi kualitas hasil, data masih menghadapi masalah format dan metadata yang belum seragam. Pada dimensi kepuasan pemangku kepentingan, pemerintah daerah cukup terbantu, sedangkan pemanfaatan oleh masyarakat masih rendah karena kurangnya sosialisasi dan literasi data.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada lokus kajian yang hanya berfokus pada Kabupaten Pinrang dan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga hasilnya bersifat kontekstual. Penelitian ini juga bergantung pada ketersediaan data portal, dokumen pemerintah, serta keterangan informan pada waktu penelitian. Dengan demikian, perubahan kebijakan, pembaruan dataset, dan perkembangan portal setelah penelitian dapat mempengaruhi kondisi aktual Satu Data Pinrang.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan campuran dengan mengukur tingkat kepuasan pengguna portal secara kuantitatif, menganalisis kualitas metadata pada setiap OPD, serta membandingkan efektivitas Satu Data Pinrang dengan portal Satu Data daerah lain. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji pemanfaatan data terbuka oleh masyarakat, akademisi, media, dan pelaku usaha agar manfaat Satu Data tidak hanya dilihat dari sisi pemerintah, tetapi juga dari sisi publik sebagai pengguna data.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Pinrang, Bappeda Kabupaten Pinrang, Organisasi Perangkat Daerah produsen data, masyarakat pengguna data, serta seluruh pihak yang telah memberikan informasi, dukungan, dan kesempatan kepada penulis dalam pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Akbar, P., Nurmandi, A., Irawan, B., & Loilatu, M. J. (2022). Research trends in e-government interoperability: Mapping themes and concepts based on the Scopus database. *JeDEM*, 14(2), 83-108. https://doi.org/10.29379/jedem.v14i2.707

Buding, A., & Tiarani, S. N. (2021). Implementasi Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP). *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 3(2). https://doi.org/10.33701/jtkp.v3i2.2312

Campmas, A., Iacob, N., & Simonelli, F. (2022). How can interoperability stimulate the use of digital public services? An analysis of national interoperability frameworks and e-government in the European Union. *Data & Policy*, 4, Article e19. https://doi.org/10.33701/jtkp.v3i2.2313

DAMA International. (2020). *DAMA-DMBOK2: Data management body of knowledge* (2nd ed.). Technics Publications.

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1). https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075

Fitrianti, A., Amri, M., & Nurlinah. (2023). Effectiveness of local government information system on planning document preparation at the BPBD of Pasangkayu Regency. *Journal of Public Administration and Governmen*t, 5(2). https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/JPAG/article/view/982/316

Hasnita, S. S., & Salomo, R. V. (2025). Policy learning of One Data Indonesia for supporting data-driven policy. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 1-25. https://doi.org/10.25077/jakp.10.1.1-25.2025

Hidayat, M. N. (2024). Enhancing accountability and transparency in local governance through integrated information systems: A case study of Surabaya City, Indonesia. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 16(3), 228-238. https://doi.org/10.54783/jv.v16i3.1261

Kreitner, R., & Kinicki, A. (2016). *Organizational behavior* (10th ed.). McGraw-Hill Education.

Mao, Z., & Zhu, Y. (2025). Does e-government integration contribute to the quality and equality of local public services? Empirical evidence from China. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12, Article 242. https://doi.org/10.1057/s41599-025-04539-y

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Nurdin, I. (2019). *Kualitas pelayanan publik: Perilaku aparatur dan komunikasi birokrasi dalam pelayanan publik*. Media Sahabat Cendekia.

Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Media Sahabat Cendekia.

OECD. (2019). *The path to becoming a data-driven public sector*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/059814a7-en

Peraturan Bupati Pinrang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Pinrang.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Rachmat, D. F., Mulyadi, D., Abdullah, S., Putrianti, S. D., & Nurliawati, R. (2024). *Analysis of the governance of One Data Indonesia (SDI) at the Communication and Information Office of Sukabumi City*. In Proceedings of the International Conference on Public Organization. https://www.atlantis-press.com/proceedings/icas-22/125991845

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2019). *Organizational behavior* (18th ed.). Pearson Education.

Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suradinata, E. (1998). *Manajemen pemerintahan dan otonomi daerah*. Ramadan.

Tampubolon, P. G., Kartika, N. A., Mait, B. C. A., Sinaga, J. P., Fahlevi, M. R., & Apriyansa, A. (2025). Pengujian user experience (UX) penggunaan aplikasi e-purchasing terhadap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Agam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 28736-28746. https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/31538

Wirtz, B. W., Weyerer, J. C., Becker, M., & Müller, W. M. (2022). Open government data: A systematic literature review of empirical research. *Electronic Markets*, 32(4), 2381-2404. https://doi.org/10.1007/s12525-022-00582-8

Yukhno, A. (2024). Digital transformation: Exploring big data governance in public administration. *Public Organization Review*, 24(1), 335-349. https://doi.org/10.1007/s11115-022-00694-x